

(Penelitian Monodisipliner)

**“ DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA ke BELANDA
MASA KEPEMIMPINAN
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014) ”**



Disusun Oleh:
Dr. A. Irawan J. H dan Giandi Kartasasmita, S.IP., M.Sc.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
(2015)**

Daftar Isi

Bab I: Pendahuluan	h. 3
Bab II: Tinjauan Pustaka.....	h. 6
Bab III: Krisis Ekonomi Global 2008: Lingkungan Diplomasi Komersial Indonesia (III.A)	h. 12
Diplomasi Komersial Belanda (III.B)	h. 13
Diplomasi Komersial Indonesia (III.C)	h. 20
Bab IV: Kesimpulan	h. 31
Referensi	

Abstrak

Indonesia dan Belanda sudah sejak lama membangun hubungan yang baik diantar keduanya. Termasuk didalamnya adalah hubungan ekonomi, dimana perdagangan dan investasi adalah dimensi-dimensi yang amat penting. Pencapaian yang berhasil dibidang perdagangan dan investasi ditentukan tidak saja oleh faktor-faktor makro ekonomi namun juga faktor quasi politik, yang dalam hal ini adalah diplomasi ekonomi¹. Hal inilah yang mendasari penelitian ini, yakni tentang diplomasi ekonomi Indonesia ke Belanda. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deduktif, dan tipe penelitian deskriptif. Teori diplomasi ekonomi akan digunakan secara intensif dalam penelitian ini. Akan digunakan data sekunder maupun primer, dalam hal ini wawancara, dalam penelitian ini. Diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan masukan tentang cara-cara bagaimana meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia, sehingga kinerja perdagangan dan investasi antara kedua Negara akan semakin baik. Hal ini akan bermanfaat bagi pengadaan barang yang lebih variatif bagi konsumen dan bagi pembukaan tenaga kerja.

¹ Peristilahan Diplomasi Ekonomi dan Diplomasi Komersial digunakan secara berganti-ganti dalam penelitian ini. Untuk jelasnya lihat bagian teoritis dalam tulisan ini. Keduanya mencakup diplomasi yang terfokus pada dimensi ekonomi. Namun bila Diplomasi Ekonomi ditujukan pada pelaksanaannya secara multilateral, Diplomasi Komersial cenderung dilakukan pada tingkatan bilateral.

I. PENDAHULUAN

Diplomasi bilateral yang diselenggarakan antara dua Negara seyogyanya mempunyai manfaat ekonomi bagi kedua pihak, bukan sekedar manfaat politik. Manfaat ekonomi makin dipandang penting dalam hubungan dua Negara. Hal ini juga berlaku dalam hubungan Indonesia-Belanda. Walaupun pihak yang disebut terakhir pernah menjadi penjajah bagi yang lainnya dimasa lalu, namun hal ini makin lama makin tidak lagi menjadi penghalang bagi keduanya untuk berhubungan baik. Bahkan tidak berlebihan rasanya bila dikatakan bahwa salah satu Negara dengan mana Indonesia mempunyai hubungan yang paling erat adalah dengan negeri Belanda. Namun berbeda dengan masa lalu dimana hubungan terselenggara antara pihak-pihak yang tidak sederajat, hubungan Indonesia-Belanda setelah kemerdekaan Indonesia diselenggarakan dengan adanya saling menghormati antara keduanya.

Indonesia sejak lama merupakan sumber penting dari produk-produk pertambangan dan pertanian. Negara ini makin lama juga makin penting artinya juga dalam produk-produk manufaktur ringan, seperti tekstil dan produk tekstil. Disamping itu Indonesia juga dikarunia alam yang subur, sehingga berbagai produk pertanian dapat tumbuh dengan tidak mendapat halangan yang berarti. Laut Indonesia merupakan tempat yang menjanjikan untuk ekspor dari produk-produknya. Namun harus diakui bahwa infrastruktur industry Indonesia masih lemah dan perlu dibenahi. Hal ini amat penting agar investasi domestik dan asing dapat lebih berkembang.

Belanda, walaupun secara geografis jauh lebih kecil daripada Indonesia, tapi menjadi penting karena merupakan salah satu Negara anggota Uni-Eropa, yang keseluruhannya beranggotakan 28 negara. Belanda merupakan salah satu pusat produk peternakan (dairy-product), disamping produksi alat-alat berat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Belanda juga amat ahli dalam bidang pengairan. Pembuatan dam raksasa di Belanda dan pengaturan sungai-sungai yang memasuki kota-kota besarnya dengan amat selaras cukup sudah sebagai bukti apa yang dapat mereka lakukan dibidang ini.

Dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan diatas bahwa kedua Negara, Indonesia dan Belanda, mempunyai potensinya masing-masing. Artinya terbuka peluang kerjasama ekonomi yang cukup menjanjikan antara keduanya. Namun banyak pihak merasa bahwa apa yang telah dicapai sebenarnya masih dibawah dari apa yang seharusnya dapat dilakukan. Ada banyak harapan disini bahwa pemerintah Indonesia dapat lebih aktif lagi dalam menjembatani kerjasama bisnis dan ekonomi kedua belah pihak. Bila hal ini dapat dilakukan dengan berhasil tentunya hasil yang diperoleh akan lebih baik lagi. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka merupakan hal yang cukup urgen untuk meneliti apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan Indonesia, dengan menggunakan ujung tombak Kementerian Luar Negeri-RI, dalam melakukan diplomasi ekonomi sehingga kerjasama ekonomi dan bisnis Indonesia-Belanda dapat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini akan diteliti apa saja yang telah dilakukan Indonesia pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa pemerintahannya, sebagai acuan bagi apa yang perlu dilakukan Indonesia dibidang diplomasi ekonomi untuk masa mendatang.

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan disini adalah: **Bagaimana diplomasi komersial yang telah dijalankan antara Indonesia – Belanda pada masa kepemimpinan (mantan) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono?**

Kinerja perdagangan antara Indonesia dan Belanda memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini juga terjadi dibidang investasi luar negeri. Diantara berbagai faktor yang bermuara pada kinerja perdagangan internasional dan investasi luar negeri, diplomasi ekonomi merupakan suatu proses yang tampaknya perlu diberdayakan agar kinerja kedua bidang terus dapat menjadi makin baik dari waktu ke waktu.

Diplomasi ekonomi disini difahami sebagai suatu faktor yang mendukung meningkatnya perdagangan bilateral dan investasi antara dua Negara, dalam hal ini Indonesia dan Belanda. Bila diplomasi ekonomi dapat dioptimalkan, maka perdagangan dan investasi antar Negara dapat ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa akan lebih banyak barang yang dapat menjadi pilihan konsumen di kedua Negara. Disamping itu, bersamaan dengan investasi, maka ketersediaan lapangan kerja juga akan meningkat. Hal yang disebut terakhir ini amat penting bagi Indonesia. Apabila hal ini dapat dilakukan maka diaspora ribuan warga Negara Indonesia yang mencari penghidupan di Negara lain, dimana 299 diantaranya terancam hukuman mati karena berbagai kasus yang menimpa mereka, akan dapat dikurangi. Apabila penelitian tentang diplomasi ekonomi ini tidak dilakukan, maka potensi perdagangan dan investasi yang sebenarnya dapat dikembangkan tidak dapat dimaterialisasikan, dan ini tentunya adalah suatu “missed opportunity” yang amat disayangkan.

Yang menjadi pusat penelitian disini adalah bagaimana mengintensifikan diplomasi ekonomi Indonesia – Belanda, dalam tata kelola koordinasi antar lembaga Negara yang masih lemah, dan dalam peran asosiasi bisnis yang masih belum jelas. Konsep *Co-ordination*, *Good-Governance* serta *Societal-Corporatism* menjadi penting untuk dikedepankan disini.

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa kinerja perdagangan bilateral dan investasi bukan saja ditentukan oleh faktor-faktor makro ekonomi dan pertimbangan bisnis semata, namun juga oleh diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh kedua Negara.

Penelitian ini disusun sebagai berikut. Bagian pertama adalah Pendahuluan, kedua adalah kondisi ekonomi global, ketiga adalah diplomasi komersial Belanda, dan bagian keempat adalah diplomasi komersial Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Berbagai teori seperti Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi (termasuk Diplomasi Ekonomi dan Diplomasi Komersial) akan digunakan. Kebijakan luar negeri adalah suatu policy yang ditujukan untuk mencapai

tujuan-tujuan nasional, suatu Negara, yang tidak dapat diperoleh dilingkup domestik ². Kebijakan luar negeri ditujukan untuk merespons perkembangan eksternal, atau bila dilakukan oleh Negara besar, dapat juga ditujukan untuk ‘menciptakan’ pola interaksi antar Negara. Politik luar negeri dibentuk oleh faktor-faktor yang berada ditingkat individual, domestik, maupun eksternal. Politik luar negeri dapat diartikan sebagai Orientasi, Strategi, atau Behavior (praktek birokrasi yang dipraktekkan dari hari ke hari).

Diplomasi adalah komunikasi formal yang dilakukan oleh suatu Negara dengan pihak lain diluar negara ³. Hal ini dapat berupa Negara lain, Negara-negara lain, ataupun kumpulan berbagai Negara yang tergabung dalam suatu organisasi. Diplomasi adalah pelaksanaan dari politik luar negeri suatu Negara. Diplomasi haruslah dilakukan dengan mengikut sertakan kementerian luar negeri Negara yang bersangkutan, agar memperoleh otoritas sebagai bagian dari politik luar negeri. Namun hal ini tidak harus berarti bahwa aktivitas antar pihak dari dua Negara yang menyertakan kementerian luar negeri langsung menjadi bagian dari diplomasi. Tanpa agenda yang terkait dengan politik luar negeri sebagai strategi maka hal ini adalah sekedar aktivitas antar bagian dari dua Negara.

Diplomasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya pertahanan keamanan dan politik, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian ini diplomasi akan difokuskan pada dimensi ekonomi. Diplomasi ekonomi diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan dalam kerjasama antar dua Negara untuk memperoleh hasil-hasil ekonomi yang akan dapat dinikmati oleh keduanya. Hal ini biasanya meliputi berbagai upaya dibidang pemberdayaan perdagangan dan investasi. Diplomasi ekonomi akan menyertakan berbagai

² Dibidang politik luar negeri literature-liberatur berikut akan dipertimbangkan. Misalnya adalah Understanding Foreign Policy Decision Making; Alex Mintz and Karl DeRouen; Cambridge University Press.; UK; 2010. 2) American Foreign Policy and Process, 5th.ed.; James M. McCormick; Wadsworth Cengage Learning; 2010. 3) Making American Foreign Policy; Ole R. Holsti; Routledge; Britain, 2006. Hans J. Morgenthau; Alfred A. Knopf; New York, 1948. 5) World Politics: Trends and Tranformation; 2010-2011 ed.; Charles William Kegley; Cengage Brain; USA; 2011. 6) Research on Commercial Diplomacy: Review and Implications; Master Thesis; University of Twente; Faculty of Management and Governance; Shirin Reuvers; July, 2012.

³ Beberapa referensi yang akan digunakan terkait dengan diplomasi antara lain adalah: 1) Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21th. Century; Brian Hocking, Jan Melissen, Shaun Riordan, Raul Sharp; Cliengendael: Netherlands Institute of International Relations; Report no. 1; October 2012. 2) Economic Diplomacy in Practice: An Evaluation of Dutch Economic Diplomacy in Latin America; IOB Study No. 385; October 2013; Ministry of Foreign Affairs. 3) Trade Threats, Trade ars: Bargaining, Retaliation, and American Coercive Diplomacy; Ka Zeng; University of Michigan Press.; 2007.

Berbagai jurnal juga akan menjadi masukan. Misalnya adalah 1) International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times; Raymond Saner and Lichia Yiu; Discussion Papers in Diplomacy; Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”; ISSN 1569-2981. 2) Commercial Diplomacy and International Business; Discussion Papers in Diplomacy; Michael Kostecki and Oliver Naray; Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”; ISSN 1569-2981. 3) Economic Diplomacy Works: A meta-analysis of its effect on international economic flows; Selwyn J.V. Moons and Peter van Bergeijk; Prepared former colloquium 2013; August 2013. 4) Trade as a Tool of Diplomacy and Global Security; Yildiz Tugba KURTULUS KARA; PERCEPTIONS, Autumn 2008.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan akan menjadi pertimbangan. Misalnya adalah 1) “Diplomasi Ekonomi Indonesia dan MP3EI” (penelitian BPPK-OI Kementerian Luar Negeri-RI dimana penulis menjadi salah satu peneliti didalamnya); 2) “Politik Luar Negeri Indonesia dengan Eropa dan Amerika: Persepsi Kebijakan dan Strategis” (penelitian Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dengan Pusat P2K Amerop Kementerian Luar Negeri-RI dimana penulis menjadi coordinator didalamnya).

organ ekonomi Negara misalnya kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, bank sentral, bea dan cukai, dan tentunya kementerian luar negeri. Namun diplomasi ekonomi masa kini, dimana peran serta masyarakat disertakan didalamnya, juga akan memasukkan asosiasi bisnis.

Jadi dalam penelitian ini dipersepsikan bahwa kinerja perdagangan bilateral antar dua Negara dan investasi yang dilakukan (secara bilateral) ditentukan oleh berbagai faktor. Beberapa yang dikedepankan adalah potensi ekonomi masing-masing pihak, ketersediaan infrastruktur ekonomi, kondisi ekonomi global, politik luar negeri di bidang ekonomi, dan diplomasi ekonomi yang dilakukan.

Dengan mengacu pada tinjauan teoritis diatas, penulis mengajukan suatu kerangka teoritis yang menggaris bawahi bahwa: Hasil dari suatu Diplomasi Komersial yang dilakukan negara akan terkait dengan Diplomasi Komersial yang dilakukan negara mitranya, potensi dan kebutuhan akan komoditi keduanya, dan juga situasi ekonomi global yang menjadi setting interaksi mereka.

Metode Penelitian

Pendekatan atau pola pemikiran deduktif secara intensif digunakan pada penelitian ini. Sedangkan tipe penelitian relative adalah deskriptif. Data akan berbentuk data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai liberator, apakah dalam bentuk hard-copy ataupun soft-copy. Yang dimaksudkan dengan literature disini dapat berupa text book, artikel dalam jurnal, publikasi kementerian, konten website, dll. Penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan cara menganalisa hasil temuan, atau dalam hal ini data yang diperoleh, dengan menggunakan kerangka teoritis dan konseptual yang dibangun sebelumnya. Tahapan penelitian meliputi perencanaan, penulisan awal dengan menggunakan data sekunder, mengadakan seminar kecil awal, mengadakan wawancara, penulisan lanjutan, seminar penelitian, dan penulisan akhir. Penelitian akan dilakukan di Bandung dan Jakarta. Tahap penulisan sebagian besar dilakukan di Bandung, sesuai dengan profesi peneliti sebagai dosen diwajibkan untuk mengajar dan berada di kampus. Dalam tahapan mendapatkan data primer, dalam bentuk wawancara dalam hal ini, penelitian akan dilakukan di Jakarta. Hal ini disebabkan karena pihak yang perlu diwawancarai berada di Jakarta. Pihak-pihak yang dimaksudkan adalah Kementerian Luar Negeri-RI dan Kedutaan Besar Belanda. Adapun penelitian ini dalam prakteknya dibantu oleh mahasiswa Muhammad Aufar Ardian (2012330024).

Peubah yang akan difokuskan didalam penelitian ini adalah diplomasi ekonomi, atau dalam arti luas adalah komunikasi formal yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dalam upaya mempererat hubungan, yang dalam hal ini adalah hubungan ekonomi dan bisnis, antar kedua Negara.

II) DIPLOMASI, DIPLOMASI EKONOMI, DAN DIPLOMASI KOMERSIAL: SUATU KAJIAN TEORITIS

Definisi diplomasi modern dikaitkan secara langsung dengan The Westphalian System, yang berbunyi sebagai berikut "The post 1648 system of international relations in which states – secular, sovereign,

independent, and equal - are the members, and stability is preserved by the balance of power, diplomacy and international law”⁴. Namun, karena adanya perubahan-perubahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, definisi ini menjadi tidak memadai lagi. Akibatnya, diplomasi perlu didefinisikan ulang, antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh Melissen. Melissen mendefinisikan diplomasi masa kini sebagai “(Diplomacy) is defined as the mechanism of representation, communication and negotiation through which states and other international actors conduct their business”⁵. Akibatnya, dewasa ini dapat ditemui berbagai **fungsi kediplomatan** yang dilakukan oleh state, misalnya adalah economic diplomacy dan commercial diplomacy. Bersamaan dengan hal itu dapat disaksikan dengan adanya berbagai fungsi kediplomatan yang dilakukan oleh non-state actors. Misalnya adalah corporate diplomacy, business diplomacy, national NGOs diplomacy, dan transnational NGOs diplomacy⁶. Dapat dikemukakan disini bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda dari diplomasi yang dilakukan oleh negara, oleh business, dan oleh NGOs. Diplomasi ekonomi yang dilakukan negara ditujukan untuk meraih pencapaian-pencapaian dibidang investasi asing langsung dan perdagangan (teks aslinya adalah “FDI and Economic Multilateralism”). Pelaku bisnis domestik dan internasional akan mentargetkan “transnational business development”. Sedangkan NGOs akan sangat hirau kepada “socio-economical/ecological development policies”⁷.

Pentingnya Diplomasi

Diplomasi penting dilakukan agar saluran komunikasi antar suatu negara, atau pihak yang ada disuatu negara, dengan negara lain (atau tentunya pihak yang ada di negara lain). Tanpa adanya saluran diplomasi, maka akan banyak persoalan-persoalan antar negara yang tidak terselesaikan. Dan bila hal ini terjadi secara terus menerus maka pada suatu titik dikhawatirkan akan adanya keterdesakan negara untuk mengambil tindakan ekstrim yakni perang.

Diplomasi Ekonomi penting untuk menjaga agar hubungan ekonomi yang dilakukan antara pelaku antar negara dapat dilakukan secara benar. Negara-negara karena karakteristik perekonomiannya mempunyai sensitifitas dalam hal-hal yang dapat sama maupun berbeda. Contohnya disini adalah kekhawatiran suatu negara yang dibanjiri produk impor dari negara lain. Hal ini dikhawatirkan akan mematikan produsen-produsen local. Hal lain yang dapat dikemukakan adalah sensitivitas negara dalam menerima pekerja asing, terutama mereka yang diklasifikasikan sebagai “blue collar workers”. Banjirnya tenaga kerja asing, terutama bila mereka jauh lebih kompetitif, dikhawatirkan akan merebut lapangan kerja domestik yang tersedia. Isu-isu seperti ini antara lainnya yang menjadi alasan mengapa Diplomasi Ekonomi perlu dilakukan.

⁴ Berridge, G. R; James, Alan; (2001). DDalam “A Dictionary of Diplomacy”, Palgrafe, New York, h. 250 dalam Raymond Saner and Lichia Yiu.

⁵⁵ Melissen, Jan; (1999) ed. “Innovation in Diplomatic Practice”, Macmillan, London, h. xvi – xvii dalam “A Dictionary of Diplomacy”, Palgrafe, New York, h. 250, Raymond Saner and Lichia Yiu.

⁶⁶ “A Dictionary of Diplomacy”, Palgrafe, New York, h. 250 dalam Raymond Saner and Lichia Yiu.

Lihat juga bagan halaman 12, Raymond Saner and Lichia Yiu.

⁷ “A Dictionary of Diplomacy”, Palgrafe, New York, h. 250 dalam Raymond Saner and Lichia Yiu, halaman 25.

Diplomasi ekonomi menjadi semakin penting karena adanya beberapa faktor ⁸. Pertama adalah proses internasionalisasi yang ditandai oleh merebaknya integrasi regional dan global. Kedua adalah menguatnya liberalisasi ekonomi domestik sehingga interaksi melalui perdagangan dan investasi internasional menjadi makin intens. Ketiga adalah makin kuatnya keinginan perusahaan domestik untuk melebarkan aktivitasnya menjadi MNCs. Keempat adalah melemahnya autarchy disatu pihak dan menguatnya keterbukaan ekonomi, dimana keduanya dibarengi dengan ketersediaan metode baru dalam manajemen dan teknologi yang kesemuanya mendorong pada peningkatan hubungan antar negara dan organisasi internasional.

Tipe dan Definisi Diplomasi Ekonomi

Diplomasi mempunyai berbagai pengertian namun ada pemahaman umum yang senantiasa terkait dengan istilah ini. Diplomasi adalah komunikasi resmi yang dilakukan oleh suatu negara dengan pihak lain, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Diplomasi dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, misalnya politik, kebudayaan, dan tentunya juga ekonomi. Yang disebut terakhir, diplomasi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, walaupun untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan untuk mencapai tujuan lain, misalnya politik atau pertahanan. Contohnya disini adalah pengenaan sanksi AS terhadap Kuba dan Iran, yang dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kondisi-kondisi politik.

Ada beberapa peristilahan yang terkait dengan diplomasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi. Misalnya adalah Economic Diplomacy, Commercial Diplomacy, Trade Diplomacy, Financial Diplomacy, dan lain sebagainya. Ada beberapa pengertian yang tidak senantiasa identik tentang Commercial Diplomacy ⁹. "Commercial diplomacy is a government service to the business community, which aims at the development of socially beneficial international business ventures. Commercial diplomats perform their main activities in the host country and are usually staff members of a diplomatic mission or a trade promotion organization (TPO) / investment promotion agency (IPA) ¹⁰". Istilah Commercial Diplomacy juga dapat mengacu pada dua hal ¹¹. Pertama adalah aktivitas yang mendukung pembuatan kebijakan perdagangan, misalnya dalam negosiasi perdagangan multilateral, konsultasi perdagangan dan penyelesaian sengketa bisnis. Dan kedua adalah aktivitas yang mendukung pelaku business. Yang pertama seringkali disebut Trade Diplomacy, sedangkan yang kedua adalah Commercial Diplomacy.

⁸ Pavol Baranay; Modern Economic Diplomacy; Publications of Diplomatic Economic Club; 23-03-2009; h. 5.

⁹ Michael Kostecky and Oliver Narciac diplomacy and International Business, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2007, p. 1.

¹⁰ Kostecky p. 1.

¹¹ Michael Kostecky and Oliver Narciac diplomacy and International Business, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2007, h. 1-2.

Dalam Commercial Diplomacy ada dua tujuan yang dibidik: Government Objectives dan Business Objectives ¹². Government Objectives meliputi inteligen, pembentukan jaringan dan public relation, implementasi dari negosiasi kontrak, dan penyelesaian masalah. Sedangkan Business Objectives adalah pengembangan perdagangan, pengembangan penanaman modal asing, kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan turisme, dan dukungan kepada komunitas bisnis nasional.

Model Diplomasi Ekonomi

Ada tiga model dari yang kita mengerti sebagai diplomasi ekonomi ¹³. Pertama adalah the United Model “... a complex ... of bilateral trade and economic relations under the aegis of Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign affairs is the main co-ordinator of economic interest of the country at the international level. It defines the strategy and priorities in cooperation with all governmental organizations and regional organs of executive power of the host country”. Kedua adalah The Partially-United Model “The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economics jointly organize their work on the development of trade and economic relations where the trade and economic mission is allocated to the separate division of diplomatic mission, and, as a result, is in a double subordination to the Ministry of Foreign Affairs and to the Ministry of Economics. This model also implies the independence of the diplomatic mission and its budget. The head of the trade and economic mission reports to the head of diplomatic mission who supervises his work. The work priorities of the trade and economic mission are defined by the Ministry of Economics”. Dan ketiga adalah “task delegation on the organisation of trade and economic relations to a third party”. “...Ministry of Foreign Affairs becomes more passive in monitoring over the trade and economic situation in the host country of diplomatic mission, uses the services of the third party only in the event if such need arises, therto gives assignments to the agencies to promote the export and marketing researches in impartial interest in investments concluding the corresponding contracts”.

Fungsi Diplomasi Ekonomi

Ada beberapa tugas dari (economic) diplomatic mission. Beberapa diantaranya adalah ¹⁴“...assistance to participants of external economic relations in their work of their own countries in the host country’co-ordination without intervention in their economic activity; representation of its own country where the financial, economic and political situation contributes to consider it as a reliable overseas trade parter;

¹² Michael Kostecky and Oliver Narcial diplomacy and International Business, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2007, h. 8

¹³ Pavol Baranay; Modern Economic Diplomacy; Publications of Diplomatic Economic Club; 23-03-2009; hal. 8. Bagian ini adalah suatu pengutipan. Tidak diberikannya tanda kutip hanya dimaksudkan agar tidak terjadinya kejanggalan dalam penulisannya.

¹⁴ Pavol Baranay; Modern Economic Diplomacy; Publications of Diplomatic Economic Club; 23-03-2009; h. 7. Bagian ini adalah suatu kutipan. Tidak dicantumkannya tanda kutip hanyalah dimaksudkan agar tidak terjadi kejanggalan dalam penulisannya.

to render assistance of international trade in the realization of activities, to organize negotiations, congresses, round tables, exhibitions; to examine proposals received of the enterprises to export and import goods and services, investment inquiries and offers; to render counseling and informational services; use local experts for the economy and market analysis, where special knowledge is required therefore the career diplomat may not have"

Berbagai Dimensi Diplomasi Ekonomi

Terdapatnya berbagai dimensi Diplomasi Ekonomi mendorong penulis untuk setidaknya membahas beberapa diantaranya dibawah ini.

Situasi dilaksanakannya Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi diselenggarakan dapat dalam suatu situasi waktu yang berbeda. Pertama DE dilakukan dalam kondisi normal, saat dimana pihak-pihak berada dalam kondisi ekonomi yang terkategori 'normal'. Pelaksanaan DE dalam kondisi ini penting karena pada umumnya situasi yang dihadapi berada dalam kategori ini. Perekonomian masyarakat sehari-hari sedikit banyak tergantung pada keberhasilan pelaksanaan DE dalam situasi seperti ini. DE dalam waktu normal adalah suatu proses yang dilakukan ketika perekonomian negara tidak dalam keadaan terganggu.

Namun, yang kedua, DE juga amat penting artinya ketika dilakukan dalam kondisi ekonomi yang diluar normal, atau dalam hal ini ketika terjadi krisis ekonomi. DE disini dilakukan ketika perekonomian suatu negara tidak berada dalam kondisi normal. Konsekuensinya adalah bila DE tidak dapat dilakukan dengan berhasil maka perekonomian negara yang tengah mengalami krisis dapat runtuh. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh semua pihak. Ini dikarenakan akibatnya yang amat merusak seperti misalnya terjadi migrasi penduduk secara besar-besaran ke negara lain untuk mendapatkan penghasilan, pergantian rejim karena hilangnya kepercayaan terhadap mereka, merebaknya instabilitas politik dan kriminalitas karena tidak bekerjanya negara, meningkatnya perdagangan gelap persenjataan bila negara yang mengalaminya merupakan produsen persenjataan, dan lain sebagainya.

Berbagai Forum Diplomasi

Diplomasi dapat dilakukan dalam berbagai forum. Beberapa diantaranya adalah forum bilateral, forum regional, dan forum multilateral. Forum bilateral adalah suatu arena dimana hanya dua negara berinteraksi secara timbale balik. Dalam forum seperti ini hasil-hasil konkrit, misalnya adalah sinkronisasi peraturan, dapat dicapai. Dalam forum multilateral, hasil yang paling tinggi yang mungkin akan dicapai adalah kesepakatan tentang suatu code of conduct. Seringkali dikatakan bahwa hasil dari suatu

diplomasi dalam forum multilateral terbatas pada pembentukan suatu soft-law. The development of socially beneficial international business ventures. Commercial diplo

Tahapan dalam Diplomasi Ekonomi

Ada tiga tahapan Economic Diplomacy, dimana tidak berarti bahwa ketika tahapan yang lebih lanjut dilakukan berarti tahapan yang lebih awal ditinggalkan¹⁵. Tahapan yang pertama dapat disebut Economic Salesmanship. Dalam tahapan ini diplomat perlu memperkenalkan keahlian-keahlian yang dimiliki warganegara di negara asing yang ditempati. Diplomat membantu penyertaan mereka dalam proyek-proyek dinegara asing tersebut. Jadi para diplomat disini berperan untuk membantu warganegara secara individual mendapat tempat dalam struktur bisnis negara tujuan. Tahapan kedua yang disebut Economic Networking and Advocacy difokuskan pada dukungan pada organisasi bisnis negara yang diwakili oleh diplomat untuk menjalin kontak dengan mitranya di luar negeri. Hasil yang diharapkan disini tidak lagi berskala individu, tapi dalam bentuk kerjasama antar perusahaan kedua negara. Dan yang ketiga adalah Regulatory Management and Resource Mobilization dimana tujuan dari Economic Diplomacy adalah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional di fora internasional. Ini tentunya membutuhkan koordinasi dan kondisi dimana pelaku-pelaku bisnis dalam negeri telah mempunyai reputasi. Dengan koordinasi elemen-elemen pemerintah, maka berbagai kerangka hubungan ekonomi luar negeri yang aplikabel dapat dibentuk.

Perubahan dalam Diplomasi dan Munculnya Public Diplomacy

Berbagai perubahan telah terjadi dalam area 'diplomasi', yang membutuhkan adaptasi segera dan mendasar¹⁶. Adapun perubahan-perubahan penting yang mempengaruhi diplomasi, yang patut diusung disini adalah sebagai berikut. Pertama adalah munculnya fungsi-fungsi politik luar negeri dan kementerian luar negeri pada lembaga-lembaga ditingkat pusat maupun profinsial¹⁷. Kedua adalah munculnya fungsi-fungsi kediplomatan pada transnational enterprises¹⁸. Dan ketiga adalah makin aktifnya NGOs dalam pengelolaan global dan diplomasi ekonomi¹⁹. Hal-hal ini mengindikasikan adanya pelaksanaan "politik-luar negeri" oleh lembaga pemerintah selain MOFA, oleh korporasi, dan oleh NGOs. Perkembangan ini menghadapkan MOFA pada dua pilihan: memandang pelaku-pelaku aktivitas in sebagai pesaing, atau justru merangkul mereka menjadi mitra. Pilihan kedua jelas lebih bermanfaat,

¹⁵ Kishan S Rana; Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries , h. 10-13.

¹⁶ Raymond Saner and Lichia Yiu; International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times"; Netherlandonals Institue of International Relation 'Cliengendael'.

¹⁷ Raymond Saner and Lichia Yiu; International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times"; Netherlandonals Institue of International Relation 'Cliengendael', h. 4.

¹⁸ Raymond Saner and Lichia Yiu; International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times"; Netherlandonals Institue of International Relation 'Cliengendael', h. 5.

¹⁹ Raymond Saner and Lichia Yiu; International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times"; Netherlandonals Institue of International Relation 'Cliengendael', h. 8.

karena dengan melakukan hal ini kemungkinan-kemungkinan pencapaian yang besar dapat diharapkan. Namun bersamaan dengannya, apabila MOFA memutuskan untuk melakukan hal ini, maka perlu adanya kerelaan untuk berbagi peran, barangkali juga kerelaan untuk melihat mitranya memperoleh keuntungan financial yang lebih langsung dari pekerjaan kolektif yang dilakukan. Hal ini perlu dipertimbangkan karena kerjasama ini mungkin saja memuat agenda-agenda yang berbeda, yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh MOFA.

Semula pelaku diplomasi terbatas pada negara, yang dalam hal ini adalah “government officers” yang mewakili suatu negara dalam upaya pengejaran kepentingan negara. Namun terutama semenjak munculnya konsep Good-Government yang dikemukakan oleh World Bank decade 80’an, maka pelaku diplomasi tidak terbatas lagi pada petugas pemerintah. Hal ini disebabkan karena konsep GG memandang bahwa pengelolaan negara tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menyertakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena eksistensi negara dipandang hanya dapat dijustifikasi bila ditujukan pada pencapaian tujuan negara. Dalam kerangka inilah penyertaan actor non pemerintah dalam diplomasi, termasuk DE, menjadi sesuatu yang relevan.

Salah satu literature yang mengemukakan peran actor non-pemerintah dalam diplomasi adalah McDonald (...). Dalam bagannya McDonald memberi contoh bahwa actor-aktor non-pemerintah dapat saja berpartisipasi dalam diplomasi yang dinotasikannya sebagai Total Diplomacy (?). Contoh-contohnya misalnya adalah NGOs, kelompok kepentingan, asosiasi bisnis, asosiasi buruh, seniman, dll. Sekarang bahkan mulai diikuti sertakan para ahli berbagai masakan untuk berpartisipasi dalam Culinaire Diplomacy. Melalui konsep TD penyertaan actor non-pemerintah dalam diplomasi menjadi suatu praktek yang bukan hanya dapat diterima namun menjadi sangat esensial.

Pada akhir bagian ini penulis merasa perlu untuk sekali lagi menyampaikan pandangan yang diusung dalam penelitian ini bahwa kinerja Diplomasi Komersial terkait dengan pola DE yang dilancarkan kedua belah pihak dan juga dengan kondisi ekonomi global yang menjadi latar belakangnya.

III.A) KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008: LINGKUNGAN DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA

Sebagaimana yang disampaikan pada bagian awal penelitian ini, kondisi ekonomi global perlu diperhatikan ketika Diplomasi Komersial suatu negara ingin diteliti. Dalam konteks inilah berikut akan dibahas secara singkat kondisi ekonomi global pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang terjadi tahun 2008 di Amerika-Serikat amat perlu mendapat perhatian, karena dampaknya yang bersifat global. Hampir semua negara yang telah terintegrasi dalam ekonomi global merasakan dampak negative yang terjadi di Amerika-Serikat, pusat dari perekonomian global. Sebagaimana yang telah diingatkan oleh berbagai pakar ekonomi-politik, misalnya Susan Strange, pasar capital dengan kecenderungan perilaku investor didalamnya amat mungkin menciptakan suatu krisis. Pasar capital penuh dengan kecenderungan spekulasi, herding, dan dampaknya mungkin sekali bersifat contagion, atau menular ke pasar-pasar capital lainnya. Hal ini jugalah yang terjadi di NYSE (New York Stock Exchange).

Kesemuanya berasal dari sub-prime marga, kredit perumahan yang dibebutikan dengan prasyarat financial yang sangat longgar. Akibatnya tentu saja amat banyak pihak yang mendapatkan kredit perumahan tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak mampu secara financial untuk mencicilnya. Namun untuk sementara praktek ini berjalan lancar, karena kemudian kredit tersebut ditransfer menjadi produk-produk financial derivative. Produk-produk derivative inilah yang kemudian ditransaksikan di pasar saham terbesar di dunia, NYSE. Spekulasi kemudian digulirkan, bersamaan dengan berbagai rumor positif yang ilusif tentang prospek luar biasa produk-produk derivative ini, tanpa menyatakan keterkaitannya dengan kredit perumahan. Masyarakat awam, bahkan perusahaan, yang bertransaksi dalam kondisi asimetris informasi terus membeli saham-saham ini. Terjadilah bubble di pasar capital AS dalam skala yang amat besar. Namun kita tahu bahwa, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Hyman dan Kindleberger, bubble ini tidak mungkin berumur panjang.

Kredit perumahan yang dijadikan dasar transaksi produk-produk financial derivative ini kemudian mengalami kemacetan, dan sebagai dampaknya harga produk-produk ini tidak dapat lagi dipertahankan. Pemain besar yang mengetahui hal ini kemudian mulai menjual saham derivative yang dimiliki dalam jumlah besar, yang segera diikuti oleh pelaku-pelaku lain dalam ketidak sempurnaan informasi sehingga herding adalah satu-satunya tindakan yang 'masuk akal'. Mulailah terjadinya kejatuhan 'free-fall' harga saham, yang disertai panic pemegang saham untuk menjualnya bahkan dengan harga yang amat murah. Inilah yang kemudian terjadi secara kolateral, yang menyebabkan kejatuhan lembaga-lembaga financial besar dan legendaries seperti Lehman Brothers. Perusahaan –perusahaan lainnya juga mengalami kerugian, seperti Ford dan AIG. Tidak perlu disebut lagi bahwa masyarakat luas juga mendapat pukulan financial sehubungan dengan runtuhnya pasar saham AS.

Secara keseluruhan hal ini mengakibatkan pelemahan ekonomi AS, yang menjadi tumpuan ekonomi negara-negara di dunia, bahkan oleh China. Akibatnya disini adalah terjadi pelemahan sumber demand dari perekonomian global, dan negara-negara yang mengandalkan AS sebagai pasar dan sumber investasi kemudian akan mengalami juga perlambatan ekonomi. Krisis financial telah mengakibatkan pelemahan ekonomi global, dan karena pemulihannya terjadi secara lambat, maka perekonomian global juga mengalami hal yang sama. Inilah salah satunya lingkungan ekonomi yang juga dialami Indonesia, sehingga hasil yang luar biasa dari Diplomasi Komersial Indonesia merupakan hal yang kurang realistis.

III.B) DIPLOMASI KOMERSIAL BELANDA

Diplomasi Komersial Belanda, Diplomasi Ekonomi Uni-Eropa

Mengacu pada pengertian Diplomasi sebagai suatu proses yang dijalani oleh setidaknya dua pihak, maka pendalaman Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda juga perlu didasari pemahaman bagaimana Belanda melakukan hal ini (Diplomasi Komersial). Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa Belanda mempunyai suatu cetak biru yang serupa dalam Diplomasi Komersialnya ke berbagai negara. Dengan pemikiran inilah peneliti kemudian mencoba memahami Diplomasi Komersial Belanda ke Indonesia dengan melihat prakteknya ketika hal ini ditujukan ke negara-negara Amerika Latin.

Diplomasi Komersial yang dilakukan Belanda dengan negara lain tidak terlepas dari posisinya sebagai bagian atau anggota dari Uni-Eropa. Artinya, Diplomasi Komersial yang dilakukan Belanda dibatasi oleh aturan-aturan Uni-Eropa. Diplomasi Komersial Belanda hanya dilakukan pada promosi perdagangan dan investasi. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan bantuan yang penting dalam konstruksi berpikir diplomasi ekonomi regional Eropa; Bagaimana diplomasi Ekonomi Belanda bekerja dalam system Uni Eropa? Peranan apa yang dimainkan oleh Uni Eropa dalam penentuan kebijakan dan arah dari diplomasi ekonomi? Dalam hal apa, sebuah negara di Uni Eropa bisa mengejar kepentingannya terlepas dari kepentingan Uni Eropa?

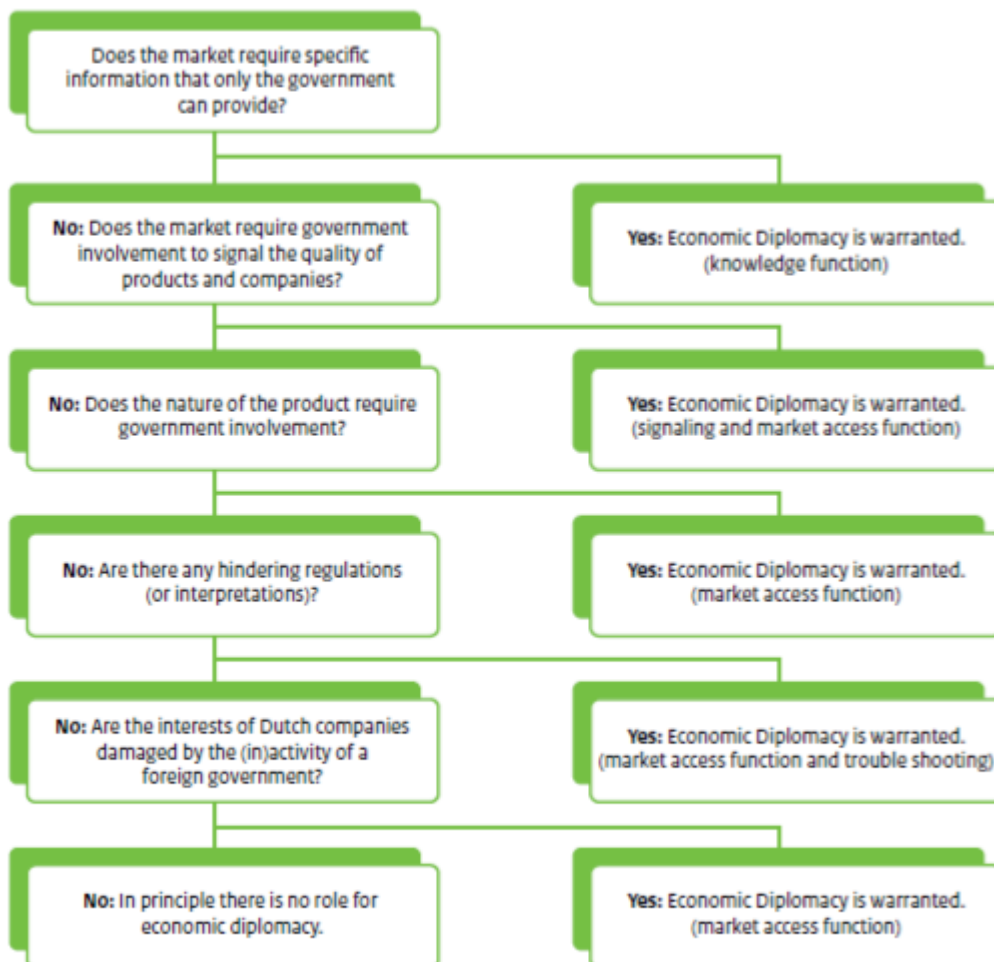
Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang unik. Sebagai sebuah organisasi regional, kebijakan Uni Eropa merupakan kompromi dari kepentingan 27 negara anggotanya sekaligus juga kompromi dari berbagai kepentingan sektoral dan area kebijakan yang berbeda. Tentunya tidak mudah untuk mendapatkan kompromi tersebut, sebagai contoh penanganan krisis Yunani memperlihatkan bahwa kompromi kepentingan sangat sulit untuk diperoleh. Diplomasi ekonomi Uni Eropa, terkait dengan proses pengambilan keputusan atau bagaimana negara anggota dan Uni Eropa mencapai atau tidak mencapai kesepakatan atau tujuan bersama, dan bagaimana Uni Eropa mempromosikan tujuan bersamanya kepada pihak lain. Di diplomasi Ekonomi Uni Eropa, masalah utamanya adalah wewenang. Siapakah yang berwenang untuk menentukan kebijakan sekaligus melakukan negosiasi terhadap pihak ketiga, negara ataupun Uni Eropa? Dalam hal diplomasi dan kebijakan perdagangan eksternal, hanya Komisi Eropa (European Commission) sebagai perwakilan dari Uni Eropa yang memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi internasional. Hasil negosiasi Komisi akan diinformasikan kepada semua negara anggota dan akan diputuskan oleh Konsil Eropa (European Council) dan Parlemen Eropa (European Parliament) untuk pengesahan atau penolakan.

Uni Eropa dianggap sebagai personifikasi dari model hubungan internasional post-Westphalia dimana negara tidak lagi memainkan peranan utama dalam HI. Berikut adalah tabel terkait dengan hak dan wewenang negara dan Uni Eropa dalam perekonomian:

Policy area	Internal policy	External policy	Negotiator
Trade (and investment)	Exclusive EU competence Title IV Chapters I-III TFEU	EU exclusive competence Art 207 TFEU for the Common Commercial Policy	European Commission
Financial market regulation	EU competence for the adoption of regulatory standards (Art 63 TFEU), but some member states competence Art 65 TFEU	Shared competence with member states playing a large role	Mostly member states, but Commission for topics that are EU competence
Environment	Mostly EU competence Art 192 (1) TFEU, but with some areas reserved for member states Art 192 (2) TFEU	Shared Art 191 (4) and last paragraph TFEU	Commission or Troika (current and next presidency, with Commission)
Development policy	Not applicable	Shared Art 209 (1) TFEU provides for EU competence, but Art 209 (2) and 211 state this is without prejudice to member states' competence	Commission and member states in parallel

Bila diplomasi ekonomi terkait kebijakan perdagangan eksternal merupakan wewenang dari Uni Eropa, wewenang apa yang diberikan kepada negara anggotanya, dalam hal ini Belanda? Belanda memiliki wewenang untuk melaksanakan diplomasi komersial. Konsep diplomasi komersial sendiri merujuk kepada penggunaan pengaruh dari negara untuk mempromosikan kepentingan komersial dari perusahaan Belanda kepada negara lain. (IOB Study, 2013:4). Diplomasi Komersial muncul sebagai jawaban dari keperluan intervensi pemerintah didalam perekonomian. Berikut adalah Flowchart terkait hal tersebut.

Figure 1 *Decision tree for economic diplomacy*



Promosi dari Kepentingan Ekonomi Belanda tertulis secara eksplisit menjadi salah satu pilar dari kebijakan luar negeri Belanda (Pilar lain adalah promosi perdamaian dan stabilitas dan promosi HAM).

Empat Peran Negara (Belanda) dalam Diplomasi Komersialnya

Dalam menjalankan Diplomasi Komersialnya, ada empat peranan yang dilakukan Belanda. Pertama adalah sebagai Fasilitator akses perusahaan Belanda ke pejabat tinggi dan top management BUMN dan swasta di negaratujuan. Kedua sebagai Negosiator penghapusan hambatan perdagangan dan peningkatan akses melalui penggunaan hubungan baik Belanda dengan negara lain. Ketiga sebagai Penyedia informasi istimewa untuk perusahaan Belanda yang tidak dapat diperoleh perusahaan tersebut dari jaringan masing-masing. Dan keempat sebagai Promotor keahlian perusahaan Belanda kepada negara lain serta koordinasi antara actor dan aktivitas ekonomi.

Adapun tujuan akhir dari diplomasi komersial tersebut adalah agar terjadi peningkatan kontak antar perusahaan Belanda dengan negara tujuan (sebagai hasil dari penggunaan jaringan, keahlian dan positioning) dan peningkatan kontrak perdagangan yang bisa dihitung melalui jumlah ekspor produk asal Belanda ke negara tersebut.

Empat Tujuan Diplomasi Komersial Belanda

Dalam Foreign Market, Dutch Opportunities (2011), pemerintah Belanda secara spesifik menjelaskan empat tujuan dari kebijakan ekonomi internasionalnya. Pertama, peningkatan kebebasan perdagangan dan modal, sekaligus memperkuat pasar bersama Eropa. Kedua, memperkuat posisi perusahaan Belanda di negara dengan potensi besar untuk perdagangan, investasi dan inovasi produk serta membatasi intervensi pemerintah asing dalam bisnis internasional. Ketiga, meningkatkan jumlah perusahaan kecil dan sedang (Small and Medium Enterprises/SMEs) yang aktif dalam skala internasional. Dan keempat meningkatkan investasi perusahaan asing di Belanda.

Negara-negara yang Diprioritaskan Belanda

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada 34 negara yang diprioritaskan Belanda. Negara-negara tersebut antara lain; Bangladesh, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombila, Tiongkok, Ethiopia, Mesir, Perancis, Jerman, Ghana, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, India, Jepang, Kenya, Malaysia, Nigeria, Polandia, Romania, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Turki, Ukraina, Inggris Raya, Amerika Serikat dan Vietnam. Pemilihan negara-negara yang diprioritaskan ini tentunya bukan tanpa adanya alasan. Negara-negara ini dipilih dikarenakan beberapa sebab. Pertama adalah tingginya potensi ekonomi. Kedua adalah karena pemerintahnya memainkan peranan yang penting dalam transisi ekonomi. Dan ketiga karena perusahaan Belanda menghadapi hambatan perdagangan yang tinggi dari negara-negara tersebut.

Belanda juga memfokuskan beberapa sektor yang dijadikan sasaran utama. Disini dapat ditemukan adanya 9 (Sembilan) sektor kunci. Dalam sektor-sektor tersebut perusahaan Belanda memiliki posisi yang cukup kuat dalam perdagangan internasional. Adapun sektor-sektor tersebut adalah, sektor tersebut antara lain agro industri dan hortikultura, material teknologi tinggi, energy, logistic, industry kreatif, ilmu pasti, kimia dan air.

Beberapa Pertimbangan dalam Penyusunan Strategi Diplomasi Komersial Belanda

Penyusunan strategi Diplomasi Komersial tentunya membutuhkan berbagai pertimbangan terkait dengan kondisi empiris dari negara tujuan. Beberapa diantaranya yang dipandang penting oleh Belanda adalah sebagai berikut: karakteristik negara, hambatan perdagangan yang ada, aturan sektoral, kekuatan perusahaan home country dan bagaimana persepsi negara tujuan terkait investasi dan perdagangan internasional.

Kerjasama Antar Kementerian dalam Pelaksanaan Diplomasi Komersial Belanda

Diplomasi komersial Belanda merupakan kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi. Berikut adalah table yang memperlihatkan pembagian wewenang diantara keduanya.

Figure 5 *Division of labour between the MFA and the MEA during evaluation period*

Ministry of Foreign Affairs	Ministry of Economic Affairs
Coordination in The Hague Strategic Travel Agenda (since 2011) Coordination of all outgoing and incoming missions of high-level government officials (Dutch ministers and the mayors of the five largest cities) to the thirteen most important destinations (including Brazil).	Policy <ul style="list-style-type: none"> • Preparation of Dutch position for international trade negotiations (EU, WTO); • Development of bilateral trade and investment agreements; • Monitoring of trade barriers.⁴⁰
Management of diplomatic network <ul style="list-style-type: none"> • Coordination of economic network (embassies, consulates, NBSO, NFIA, honorary consuls); • Political representation (including economic, political and cultural cooperation, input for trade negotiations, EU coordination); • Public diplomacy (part of which is based on the Holland Branding campaigns of NL Agency). 	Management of NL Agency⁴¹ <ul style="list-style-type: none"> • Point of contact in the Netherlands for information and advice on international business; • Management of programmes and subsidies to promote international business (such as 2g@there) • Network of Netherlands Business Support Offices (NBSO).⁴² • Support in attracting foreign investment to the Netherlands (Netherlands Foreign Investment Agency, NFIA).⁴³ • Strategy for positioning the Netherlands in foreign markets (Holland Branding campaigns).

Alokasi Sumber Daya dalam Mendukung Diplomasi Komersial Belanda

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan Diplomasi Komersialnya, Belanda mendukungnya dengan berbagai membangun jaringan ekonomi di negara sasaran.

Figure 8 *Instruments employed by the economic networks⁵⁷*

Foreign Representation	<p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacts with government at central and decentralized level (network, bilateral cooperation, political dialogue); • Contacts with non-governmental actors (universities, knowledge institutes, cultural organisations); • Contacts with government institutions, state business and private sector (including established Dutch companies); • Contacts with other foreign representations and European Commission; • Contacts with general populations (public diplomacy, consular services).
Information and Advice	<p>Provision of information and advice on macro-economic, social and political developments, rules and regulations, key actors for the Dutch government and companies. The information provided varies in depth:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exploratory information on business climate, culture, general regulations, upcoming opportunities; • Demand-driven information for companies (often through NL EVD International) on specific products, sectors and potential partners (such as the 'partner business scan' provided within 24 hours for Brazil, Colombia and Mexico);⁵⁸ • Demand-driven, in-depth information and advice, e.g. trouble shooting for Dutch companies, support with customs.
Missions	<p>Support of trade missions led by high officials or ministers, of state visits by members of the Royal Family with a business delegation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The programme includes round table discussions with Dutch and local civil servants, officials and businesspeople, seminars and participation in trade fairs to promote Dutch knowledge and expertise, and other network opportunities (e.g. reception, company visits, events).⁵⁹ <p>Companies also organize their own trade missions without government participation. Companies do this individually or together through business associations or private export promotion organizations. Since 2012 the Dutch government's subsidy for such missions (CPA, Collective Promotional Activities) has been abolished, although the economic network abroad still provides in-kind support (e.g. hosting of events).⁶⁰</p>

Pendanaan Diplomasi Komersial Belanda berfluktuasi dari tahun ketahun. Berikut adalah contoh pengeluaran diplomasi ekonomi dan komersial Belanda, yang dalam hal ini terkait dengan pendanaan antara tahun 2005-2011.

Table 1 Declining expenditures for economic diplomacy (figures in EUR million)							
Year	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total foreign expenditures (HGIS)	1,409	1,448	1,530	1,615	1,669	1,664	1,700
Ministry of Foreign Affairs							
Multilateral system for trade and investment	59	63	60	45	25	21	18
Promotion of Dutch trade and investment	5	5	5	5	6	6	7
Ministry of Economic Affairs							
Attachés	4	4	4	5	6	6	6
Multilateral system for trade and investment	4	4	4	4	4	5	4
Dutch presence in foreign markets	122	108	77	59	59	69	54
Programmes (including Topsectors since 2010)			29	41	67	67	46
Promotion of foreign investment in the Netherlands			11	12	1	1	
Ministry of Agriculture							
Attachés	18	18	19	20	20	20	23
Total							
Total promotion trade and investment	212	202	209	191	188	195	158
% expenditure foreign policy (excl. multilateral system)	15%	14%	14%	12%	11%	12%	9%

III.C. DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA: DASAR TUJUAN DAN SASARAN-SASARANNYA

Bagian ini akan memfokuskan pada hal-hal yang melandasi tujuan dari Diplomasi Komersial (dan Diplomasi Ekonomi) Indonesia yakni RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan juga MP3EI. Karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia dalam dua periode (2004-2009 dan 2010-2014) maka pemaparan tentang RPJMN juga akan dibagi kedalam dua bagian tersebut.

A. RPJMN 2004-2009²⁰

RPJMN 2004-2009 memuat 3 misi pembangunan nasional berupa :

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan Sejahtera
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Dalam misi Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, ada lima agenda pokok, yang terdiri dari

AGENDA PERTAMA

Adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.

AGENDA KEDUA

Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya masyarakat di perdesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.

AGENDA KETIGA

Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

AGENDA KEEMPAT

Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.

²⁰ “Pencapaian Sebuah Perubahan, Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009”, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2009; ISBN 978 9793764436. Sebagai catatan perlu diutarakan bahwa banyak segmen dalam bagian ini merupakan kutipan dari aslinya, untuk mempertahankan akurasi teks yang amat penting ini.

AGENDAKELIMA

adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Dari lima sasaran lima upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, ada beberapa yang terkait langsung dengan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi. Fokus kebijakan perbaikan iklim investasi adalah untuk memperbaiki kepastian hukum bagi investor, memperbaiki iklim berusaha dan memberikan insentif investasi. Di dalamnya memuat upaya memberikan kemudahan kepada investor untuk memperoleh informasi dalam mengajukan seluruh jenis ijin, terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik/on-line.
2. Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor, kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan. Ini dilakukan dengan
 - (a) Fasilitasi perdagangan luar negeri, yang dilakukan melalui peningkatan kelancaran arus barang, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi;
 - (b) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan National Single Window (NSW) dalam rangka mewujudkan kesepakatan pembentukan Asean Single Window (ASW);
 - (c) Penerapan strategi pengembangan ekspor melalui pendekatan produk/sektor, (tekstil, elektronika, produk hasil hutan, karet, CPO, alas kaki, komponen kendaraan bermotor, udang, kakao, dan kopi) dan 10 komoditas potensial (ikan dan produk ikan, makanan olahan, kulit dan produk kulit, rempah-rempah, obat-obatan tradisional, minyak esensial, alat tulis selain kertas, perhiasan, handicraft, dan peralatan kesehatan.
 - (d) Penerapan strategi pendekatan pasar utama dan/atau tradisional (misalnya: Jepang, Eropa, Amerika Serikat, China), pasar prospektif (misalnya: Timur Tengah, India, Taiwan, Australia, Republik Afrika Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Nigeria), dan pasar potensial (pasar Asia di luar ASEAN: Brazil, Eropa Timur, Meksiko, dan Chile);
3. Peningkatan akses pasar dan promosi produk ekspor, antara lain melalui: partisipasi pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, penyelenggaraan *Indonesia Solo Exhibition*, pengiriman misi dagang, dan berbagai kegiatan lain yang dimaksudkan untuk mendorong kunjungan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. Selain itu, beberapa upaya lain yang juga telah dilakukan, antara lain: (a) Penyelenggaraan 9 kantor Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) dan pembukaan 11 kantor ITPC baru. (b) Pelatihan ekspor untuk dunia usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilakukan melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB-PPEI) di Jakarta dan Kantor Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) di Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin;

4. Peningkatan efektivitas perundingan kerjasama perdagangan internasional, dengan bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (World Trade Organization/WTO); organisasi komoditi seperti: International Tripartite Rubber Council/ITRC, Association of Natural Rubber Producing Countries/ANRPC, International Pepper Community/IPC, Asian and Pasific Coconut Community/APCC, International Coffee Organization/ICO; serta organisasi internasional lainnya seperti: Developing Eight/D-8 dan General System of Trade Preferences/GSTP, regional (ASEAN plus mitra dialog dan Asia Pacific Economic Cooperation/APEC), dan bilateral (berorientasi pada peninjauan pengembangan Economic Partnership Agreement/EPA dan Free Trade Agreement/FTA).
5. Meningkatnya investasi secara bertahap, hal ini tidak terlepas dari kebijakan otoritas perbankan yang ikut mendukung. Sejak November 2006, Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan tingkat suku bunga (BI rate). Penurunan BI Rate tersebut diiringi pula dengan berbagai kebijakan yang mencakup konsolidasi, intermediasi, bank asing, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pengembangan instrumen pasar keuangan, perbankan syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, BI juga melonggarkan dan menyesuaikan sejumlah aturan mengenai penilaian aktiva produktif dan batas nilai aktiva produktif. BI menegaskan pula tentang ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 30 persen bukan hanya bagi BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, tetapi juga pada berbagai sektor pembangunan lainnya. Berbagai kebijakan sektor perbankan tersebut secara tidak langsung turut mendukung peningkatan kinerja investasi selama tahun 2007.
6. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa Kinerja pariwisata yang membaik pada 2004 kembali mengalami penurunan pada 2005. Hal ini merupakan akibat langsung dari peristiwa Bom Bali II pada Oktober 2005. Peristiwa tersebut berdampak pada penurunan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sebesar 5,7 persen atau sekitar 5,0 juta orang.
7. Penguatan ekspor produk industri melalui diversifikasi pasar ekspor Dalam rangka membuka tujuan ekspor baru karena terancamnya barang ekspor Indonesia terutama ke AS, ditempuh melalui upaya: (i) meningkatkan koordinasi antara Departemen Perindustrian (Depperin), Departemen Perdagangan (Depdag), Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN)/ asosiasi terkait serta perwakilan luar negeri terkait, dalam rangka mencari peluang diversifikasi produk ekspor; (ii) memberikan peluang ekspor yang lebih besar kepada industri kecil dan menengah dan industri kreatif dengan memberikan insentif dalam pameran-pameran produk baik di dalam maupun luar negeri; (iii) memperluas kerjasama perdagangan dengan negara lain dalam rangka meningkatkan kapasitas ekspor nasional ke negara tujuan ekspor baru, misal Timur Tengah, Afrika dan Rusia.
8. Peningkatan ekspor produk pertanian dan produk UKM

9. Percepatan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara untuk membangun perekonomian nasional

B. RPJMN 2010-2014 ²¹

Visi, dari RPJMN 2010-2014 adalah Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan yang dijabarkan dalam 14 (empatbelas) Prioritas Nasional. Yang terkait langsung dengan diplomasi ekonomi Indonesia adalah

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010- 2014 terutama dalam upaya meningkatkan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) yang dilaksanakan melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, secara umum akan dapat dicapai

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (1) penerapan PTSP, (2) penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan (3) pengurangan biaya untuk berusaha. (4) Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sistem transportasi dan pembangunan daerah menjadi sebuah konektivitas nasional dalam jalur distribusi intra pulau, antarpulau, dan jalur perdagangan internasional sangat strategis dalam menunjang daya saing usaha, mengurangi disparitas antardisparitas, dan menjaga kestabilan harga bahan pokok (5) dibangunnya sistem perizinan secara elektronik (e-licensing) yang disebut "INATRADE", sejalan dengan Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Perpres No. 10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka National Single Window (NSW). Pada INATRADE diterapkan prinsip single entry dan single exit point sehingga tidak perlu dilakukan tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses. Hingga kini sebanyak 15 jenis perizinan perdagangan dalam negeri sudah dapat dilayani secara online, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 12 jenis. Demikian pula untuk perizinan perdagangan luar negeri, sebanyak 55 jenis

²¹ "Pencapaian Sebuah Perubahan, Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014", Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2013. Sebagai catatan perlu diutarakan bahwa banyak segmen dalam bagian ini merupakan kutipan dari aslinya, untuk mempertahankan akurasi teks yang amat penting ini.

perizinan impor telah dapat dilayani secara online, meningkat cukup tinggi dari tahun 2009 yang hanya mampu melayani 26 jenis perizinan impor secara online

Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian yang terkait dengan kebijakan Industri Nasional dan peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kebijakan Industri Nasional menggariskan pemberian fasilitas kepada industri prioritas, dengan sasaran mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Tantangan besar yang dihadapi sektor industri dalam mencapai sasaran tahun 2013 dan 2014 yaitu lambatnya pemulihan krisis ekonomi global. Ini dilakukan dengan cara Peningkatan Peran dan Kemampuan RI Dalam Diplomasi Perdagangan Internasional dalam meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia melalui multitrack strategy di forum multilateral, regional, dan bilateral. Dalam forum multilateral, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya melalui G-20, G-33, dan NAMA 11. Posisi Indonesia semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah hotspot investasi baru yang menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China). Dalam kerangka ASEAN, Indonesia berperan dalam perjanjian antara lain ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Menghadapi beberapa FTA tersebut, Indonesia menerapkan strategi penguatan daya saing, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor. Secara bilateral, beberapa kesepakatan penting telah dibuat diantaranya adalah: MoU on Combating Illegal Logging and Associated Trade yaitu perjanjian penanganan pemberantasan illegal logging antara Indonesia dengan Amerika Serikat; peluncuran putaran perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA); dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan.

Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya mencakup: Peningkatan kerukunan umat beragama maupun peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

C. MP3EI sebagai Acuan Pencapaian Perekonomian Indonesia Jangka Panjang ²²

Setiap diplomasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dapat bersifat multi dimensional. Misalnya pertahanan dan keamanan, citra politik, dan juga ekonomi. Mempertimbangkan hal ini, ketika focus ditujukan pada diplomasi Indonesia dalam dimensi ekonominya, maka perlu diidentifikasi tujuan ekonomi seperti apa yang ingin dicapai Indonesia melalui diplomasinya. Dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memiliki tiga strategi ekonomi yang dijalankan secara berbarengan. Strategi-strategi tersebut adalah RPEJM (Rencana Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah) dan RPEJP (Rencana Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang), serta MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia: 2011-2025). Berikut akan dijelaskan secara ringkas MP3EI sebagai suatu strategi ekonomi yang diusung pada masa pemerintahan Susilo Bambang

²² Bagian MP3EI ini banyak sekali mengandung pengutipan langsung. Hal ini dilakukan agar arti yang terkandung didalamnya tidak mengalami bias. Tidak dicantumkan tanda kutip semata-mata adalah agar penulisannya tidak janggal.

Yudhoyono, yang disusun oleh Bappenas, yang sedikit banyak akan mempengaruhi diplomasi ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan MP3EI telah menyatakan sasaran-sasaran ekonomi yang cukup eksplisit.

MP3EI tidak dimaksudkan untuk menggantikan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), namun untuk dijadikan suatu strategi yang dijalankan secara bersamaan²³ (p. 23). Adapun RPJPN mempunyai durasi waktu antara tahun 2005-2025, dan didasari oleh UU No. 17 Tahun 2007). Adapun MP3EI dilaksanakan melalui 3 hal. Pertama adalah pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; penguatan konektivitas nasional; dan penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional. Hal-hal ini sekaligus diperuntukkan bagi terciptanya tiga hal. Pertama adalah mendorong realisasi investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Kedua sinkronisasi rencana aksi untuk merevitalisasi kinerja sector riil. Dan ketiga pengembangan centre of excellence disetiap koridor ekonomi (p. 24). Strategi pembangunan jangka panjang ini membagi Indonesia kedalam enam wilayah ekonomi, yang disebut sebagai “koridor ekonomi”. Keenam koridor tersebut adalah koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua serta kepulauan Maluku. Masing-masing koridor ekonomi ini mempunyai kekhususan (p. 47).

Dalam MP3EI Indonesia terbagai dalam enam koridor ekonomi. Pertama adalah Sumatera, dengan tema pembangunan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional (h. 51). Terdapat 11 pusat ekonomi dalam koridor Sumatera, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjungpinang, Pangkal Pinang, Padang, Bandar Lampung, Bengkulu, dan Serang. Adapun kegiatan ekonomi utama koridor ini berupa kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan, besi baja, dan kawasan strategis nasional (KSN) Selat Sunda. Kedua adalah koridor ekonomi Jawa (h. 71). Tema pembangunan yang diusung adalah mendorong industry dan jasa nasional. Ada lima pusat ekonomi dalam koridor ini: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan kegiatan ekonomi koridor ini adalah makanan dan minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutsista, dan area Jabotabek. Ketiga adalah koridor ekonomi Kalimantan (h. 96). Tema pembangunan ekonomi untuk koridor ini adalah pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energy nasional. Terdapat 4 Pusat ekonomi disini: Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, dan Samarinda. Sedangkan kegiatan ekonomi pada koridor ini adalah minyak dan gas, batu bara, kelapa sawit, besi dan baja, bauksit, dan perKayuan.

Keempat adalah koridor ekonomi Sulawesi (h. 120). Tema pembangunan untuk koridor ini adalah pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Ada enam pusat ekonomi untuk koridor ini yakni Makasar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado. Pertanian pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), kakao, perikanan nikel, minyak dan gas bumi merupakan kegiatan ekonomi utama koridor ini. Kelima adalah koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara (h. 140). Tema pembangunan untuk koridor ini adalah pintu gerbang pariwisata dan

²³ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011. Penjelasan pada bagian MP3EI ini kesemuanya berasal dari referensi ini. Untuk menghindari penyimpangan arti, pokok-pokok MP3EI yang dituliskan diatas diambil sebagaimana halnya suatu kutipan, walaupun tidak menggunakan tanda kutip.

pendukung pangan nasional. Denpasar, Lombok, Kupang, dan Mataram adalah empat pusat ekonomi pada koridor ini. Adapun kegiatan ekonomi utama berupa pariwisata, perikanan, dan peternakan. Dan keenam adalah koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku (h. 156). Tema pembangunan yang diusung untuk koridor ini adalah pusat pengembangan pangan, perikanan, energy dan pertambangan nasional. Terdapat tujuh pusat ekonomi disini yakni Sofifi, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, dan Merauke. Sedangkan kegiatan ekonomi utama koridor ini adalah pertanian dan pangan (MIFEE), tembaga, nikel, minyak dan gas bumi, dan perikanan.

Ada delapan program utama dalam MP3EI (p.22). Mereka adalah pertanian, pertambangan, energy, industry, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut kemudian dibagi atas duapuluhdua aktivitas ekonomi utama(p.22). Aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut adalah tekstil, makanan dan minuman, besi baja, alutsista, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, pariwisata, pertanian pangan, Jabodetabek Area, KSN Selat Sunda, peralatan transportasi, telematika, dan perkapalan.

MP3EI dilaksanakan dalam tiga fase (h. 178). Fase pertama adalah Implementasi quick win, dan direncanakan untuk dilaksanakan dari tahun 2011-2015. Dalam fase ini terdapat lima poin penting. Pertama adalah pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Kedua penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi, perijinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi. Ketiga adalah penetapan internasionalisasi hub untuk pelabuhan dan Bandar udara. Keempat adalah penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masing-masing koridor. Dan keenam pengembangan kompetisi SDM sesuai dengan kegiatan ekonomi utama koridor.

Fase kedua adalah memperkuat basis ekonomi dan investasi, direncanakan untuk dilaksanakan dari tahun 2015-2020. Dalam tahapan ini terdapat empat butir penting. Pertama adalah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang. Kedua adalah memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI. Ketiga peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang. Dan keempat perluasan pengembangan industry penciptaan nilai tambah.

Sedangkan fase ketiga adalah melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan, diperuntukkan bagi tahun 2020-2025. Tahapan ini terdiri atas pemantapan daya saing industry untuk memenangkan persaingan global. Berikutnya adalah penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan. MP3EI adalah suatu kerangka pembangunan ekonomi Indonesia yang diperuntukkan untuk tahun 2011-2025. Strategi pembangunan ekonomi eksis bersamaan dengan RPJM dan RPJP.

Pokok-pokok Utama Politik Luar Negeri Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ²⁴.

Arah politik luar negeri di Indonesia, bukan dalam hal landasaan idiilnya, secara kuat ditentukan oleh visi dan misi presiden. Setiap presiden mempunyai hak prerogative untuk membentuk politik luar negeri RI. Mempertimbangkan hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dikemukakan, walaupun tidak secara terlalu mendalam, prioritas politik luar negeri RI dibawah kepemimpinan (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ²⁵.

Pertama adalah Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerjasama ASEAN. Kedua adalah Meningkatkan Peran Indonesia untuk Turut Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia. Ketiga adalah Meningkatkan Diplomasi Perbatasan yang Ditandai dengan terselesaikannya Secara Bertahap Permasalahan-Permasalahan Perbatasan. Keempat Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI. Kelima Meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, dan perlindungan kekayaan budaya. Keenam Memantapkan Kemitraan Strategis di Kawasan Aspasaf dan Amerop. Ketujuh Meningkatkan Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Forum Multilateral. Kedelapan Meningkatkan Kerjasama Selatan-Selatan..

Kesembilan Mengedepankan Identitas Indonesia Sebagai Negara Kepulauan dalam Pelaksanaan Diplomasi dan Membangun Kerjasama Internasional. Kesepuluh Meningkatkan Peran Global Melalui Diplomasi *Middle Power* yang Menempatkan Indonesia sebagai Kekuatan Regional dengan Keterlibatan Global Secara Selektif, dengan Memberi Prioritas pada Permasalahan yang Secara Langsung Berkaitan dengan Kepentingan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Kesebelas Memperluas Mandala Keterlibatan Regional Di Kawasan Indo-Pasifik. Fokus ke Kawasan Indo-Pasifik “Mengintegrasikan’ Dua Samudera – Samudera Hindia dan Samudera Pasifik – Sebagai Lingkungan Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri di Kawasan. Keduabelas Merumuskan dan Melaksanakan Politik Luar Negeri yang Melibatkan Peran, Aspirasi, dan Kepentingan Masyarakat.

Diplomasi Komersial Indonesia

Penelitian ini tampaknya masih harus dilanjutkan lagi. Hal ini dikarenakan penelusuran tentang Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda belum betul-betul tuntas. Hasil yang dapat dicapai disini adalah memperkirakan pola Diplomasi Indonesia secara umum. Hasil yang lebih khusus dharapkan dapat diperoleh pada penelitian yang berikutnya.

²⁴ Tulisan yang disusun oleh: Angguntari C. Sari, Giandi Kartasasmita, Idil Syawfi, Diandra Dewi, Atom G. Munthe, Arie Indra Chandra. Untuk elaborasi mengenai permasalahan yang harus ditangani dalam periode 5 tahun , 2009-2014, di 8 fokus ini, dan arahan polugri untuk mencapai sasaran silakan merujuk ke buku II RPJMN. Presiden Republik Indonesia, “Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab IV Politik”, hal 47-57& 59-64, <http://kawasan.bappenas.go.id/images/BUKUII/BAB%20VI%20all.pdf> .

²⁵“Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab IV Politik”, hal 47-57& 59-64, <http://kawasan.bappenas.go.id/images/BUKUII/BAB%20VI%20all.pdf> . Poin-poin ini juga dikemukakann oleh Atom Ginting Munthe, Arie Indra Chandra, Anggun C. S, Giandi Kartasasmita, Idil S.

Bagaimana Struktur Diplomasi Ekonomi Indonesia selama 2004-2014? Berikut akan dibahas tentang Diplomasi Ekonomi Indonesia.

Hingga tahun 2011 saja Indonesia telah menandatangani 146 perjanjian internasional dan meratifikasi 26 perjanjian, dimana 60 persen di antaranya merupakan kerjasama ekonomi (Kementerian Luar Negeri RI 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh P.M Erza Killian ²⁶ dengan mengadopsi tipologi diplomasi ekonomi negara berkembang dalam menganalisa diplomasi ekonomi Indonesia menemukan beberapa hal berikut :

1. Kemenlu hanya memberikan satu indikator keberhasilan diplomasi Indonesia yaitu peningkatan volume perdagangan Indonesia dengan mitra-mitra dagangnya
2. Dalam delapan typologi indkator Rana, Indonesia masih lemah dalam berbagai indikator, misalnya :
 - a. Dalam pengelolaan kebijakan dan manajemen ekonomi eksternal, kemenlu sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi indonsia masih sangat terbatas peranannya. Misalnya Kemenlu bukan bagian dari mitra kerja Menko Perekonomian (ada 19 instansi terkait yang dibawah koordinasi Menko Perekonomian)

²⁶ Paradigma dan Problematika Diplomasi Indonesia dalam Global Strategis, thn 6, no 2 Juli-Desember 2012. Sebagai catatan perlu diutarakan bahwa banyak segmen dalam bagian ini merupakan kutipan dari aslinya, untuk mempertahankan akurasi teks yang amat penting ini.

Tabel 2
Kementerian/Lembaga Terkait
dalam Koordinasi Ekonomi Indonesia

No.	Lembaga/Kementerian	No.	Instansi/Kementerian
1.	Kem. Keuangan	11.	Kem. Pariwisata & Ekonomi Kreatif
2.	Kem. Energi & Sumberdaya Mineral	12.	Kem. Riset & Teknologi
3.	Kem. Perindustrian	13.	Kem. Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
4.	Kem. Perdagangan	14.	Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal
5.	Kem. Pertanian	15.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6.	Kem. Kehutanan	16.	Badan Usaha Milik Negara
7.	Kem. Perhubungan	17.	Badan Pertanahan Nasional
8.	Kem. Kelautan & Perikanan	18.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Kem. Tenaga Kerja & Transmigrasi	19.	Badan Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
10.	Kem. Pekerjaan Umum		

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- b. Aktivitas ekonomi eksternal utama dijalankan oleh kementerian lain misalnya promosi perdagangan dan investasi merupakan domain dari Kementerian Perdagangan dan aktivitas moneter dan finansial dibawah koordinasi dari BKPM, ini berbeda dengan Australia yang menggabungkan antara fungsi departemen perdagangan, luar negeri dan instansi yang membidangi bantuan perdagangan (Australian Department of Foreign Affairs and Trade) dalam satu badan ataupun mekanismen kerja yang sudah dibagi antara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Belanda .
- c. Dalam Hal keterlibatan aktor non negara dalam diplomasi ekonomi indonesia pun dianggap sangat terbatas, kebijakan yang selalu dilakukan terburu-buru melahirkan ungkapan diplomasi sangkurian, dimana proses diskusi dan strategi baru dimrumuskan semalam sebelum proses negosiasi (Yusuf 2011 dalam Killan)
- d. Peran Kemenlu dalam pengelolaan bantuan luar negeri juga terbatas, dalam hal koordinasi dan pengambilan kebijakan, keputusan dan implementasi terkait bantuan luar negeri dijalankan oleh BAPPENAS

IV. KESIMPULAN

Walaupun dalam dokumen resmi RI istilah Diplomasi Ekonomi merupakan istilah baku yang digunakan, namun untuk kepentingan teks akademik penulis cenderung memilih untuk menggunakan istilah Diplomasi Komersial dalam mengupas dimensi hubungan ekonomi bilateral Indonesia – Belanda. Namun dalam praktek empirisnya, keduanya dapat dipandang mempunyai arti yang mempunyai kemiripan. Adapun pertimbangan dibalik pengenalan istilah Diplomasi Komersial ini adalah agar praksis yang mirip dengannya misalnya hubungan ekonomi negara dengan organisasi ekonomi regional dan global (Diplomasi Ekonomi), dan hubungan antara dua perusahaan yang berada di negara-negara yang berbeda (Diplomasi Bisnis) dapat dibedakan dengannya. Konsep Diplomasi Ekonomi digunakan, setidaknya secara akademik, untuk hubungan yang bersifat multilateral sedangkan Diplomasi Komersial adalah ditingkat bilateral.

Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda untuk tujuan jangka panjangnya mengacu pada Mukadimah UUD Indonesia, dimana hal ini bersifat tetap. Hal yang berubah adalah adanya tekanan-tekanan yang berbeda oleh kepemimpinan nasional yang dapat berganti. Dalam kepemimpinan nasional Susilo Bambang Yudhoyono terdapat sebelas (12) poin yang mendapat tekanan, dimana salah satunya adalah pada pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia.

Disamping RPJMN, MP3EI juga merupakan strategi yang relevan untuk digunakan sebagai pegangan bagi Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda. Hal tersebut dikarenakan MP3EI memberi arahan untuk investasi luar negeri, termasuk dari Belanda, dalam hal produk dan lokasi investasi di Indonesia. MP3EI sekaligus memuat informasi tentang lokasi sumber-sumber ekspor Indonesia.

Tidak sebagaimana Indonesia yang mempunyai ruang gerak yang cenderung bebas walaupun telah menjadi bagian dari suatu regionalisme, ASEAN dalam hal ini, Belanda lebih terbatas geraknya oleh aturan-aturan Uni-Eropa. Ini disebabkan karena ASEAN adalah suatu regionalism yang longgar, sedangkan Uni-Eropa telah mempunyai capaian-capaian supranasionalisme.

Diplomasi Komersial Indonesia-Belanda diperuntukkan bagi pengembangan lebih jauh lagi perdagangan dan investasi antar kedua negara. Investasi terutama dilakukan oleh perusahaan Belanda ke Indonesia, sedangkan perdagangan secara dua arah. Hubungan investasi dan perdagangan kedua negara masih harus ditingkatkan, karena dalam segi perdagangan Belanda belum termasuk kedalam lima besar negara tujuan ekspor Indonesia, padahal potensi untuk itu masih amat tersedia.

Peneliti mengasumsikan bahwa Diplomasi Komersial yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia mempunyai kemiripan dengan yang dilakukannya di negara-negara lain, walaupun Indonesia termasuk diantara 34 negara yang diprioritaskannya. Dengan mengacu pada hal ini terlihat bahwa bahwa strategi Diplomasi Komersial Belanda telah disusun secara terinci. Masing masing pelaku faham apa yang harus dilakukan, dan sejauh mana mereka mempunyai otoritas untuk melakukannya. Tujuan Diplomasi Komersial Belanda ke Indonesia mempunyai cakupan yang lebih sempit, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pendalaman. Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda masih bersifat umum, kerap

tumpang tindih terjadi antar kementerian atau organ negara lainnya, dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Hal ini merupakan tantangan laten yang senantiasa perlu diperbaiki.

Catatan Akhir

Sebagai catatan akhir perlu disampaikan bahwa sampai pada tahap ini penelitian belum dapat menjawab secara rinci pola Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Dalam konteks ini, apabila dimungkinkan, hal-hal yang masih menjadi kekurangan akan dilengkapi dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

REFERENSI

“Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab IV Politik”, hal 47-57& 59-64, <http://kawasan.bappenas.go.id/images/BUKUII/BAB%20VI%20all.pdf> .

Commercial Diplomacy and International Business; Discussion Papers in Diplomacy; Michael Kostecki and Oliver Naray; Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”; ISSN 1569-2981. Economic Diplomacy in Practice: An Evaluation of Dutch Economic Diplomacy in Latin America; IOB Study No. 385; October 2013; Ministry of Foreign Affairs.

Economic Diplomacy Works: A meta-analysis of its effect on international economic flows; Selwyn J.V. Moons and Peter van Bergeijk; Prepared former colloquium 2013; August 2013.

Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21th. Century; Brian Hocking, Jan Melissen, Shaun Riordan, Raul Sharp; Cliengendael: Netherlands Institute of International Relations; Report no. 1; October 2012.

Hans J. Morgenthau; Alfred A. Knopf; New York, 1948. International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times; Raymond Saner and Lichia Yiu; Discussion Papers in Diplomacy; Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”; ISSN 1569-2981.

Kishan S Rana; Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries , h. 10-13.

Making American Foreign Policy; Ole R. Holsti; Routledge; Britain, 2006.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

Michael Kostecky and Oliver Narcial diplomacy and International Business, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2007, h. 1-2.

Pavol Baranay; Modern Economic Diplomacy; Publications of Diplomatic Economic Club; 23-03-2009; h. 5.

Raymond Saner and Lichia Yiu; International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times”; Netherlandonals Institue of International Relation ‘Cliengendael’.

Trade as a Tool of Diplomacy and Global Security; Yildiz Tugba KURTULUS KARA; PERCEPTIONS, Autumn 2008.

Trade Threats, Trade Wars: Bargaining, Retaliation, and American Coercive Diplomacy; Ka Zeng; University of Michigan Press.; 2007.

Understanding Foreign Policy Decision Making; Alex Mintz and Karl DeRouen; Cambridge University Press.; UK; 2010.

World Politics: Trends and Tranformation; 2010-2011 ed.,; Charles William Kegley; Cengage Brain; USA; 2011. 6) Research on Commercial Diplomacy: Review and Implications; Master Thesis; University of Twente; Faculty of Management and Governance; Shirin Reuvers; July, 2012.